

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN UMUM

A. Profil Provinsi Bengkulu.

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan pertama di daratan Pulau Sumatera dan provinsi terkecil urutan kesepuluh di Indonesia. Namun, apabila di tambah dengan provinsi yang berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan ketiga dari sepuluh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatera, setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut merupakan batas-batas wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Bengkulu:

1. Utara : provinsi sumatra Barat.
2. Timur : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selatan : Provinsi Lampung.
4. Barat : Samudera Hindia.

Di wilayah Bengkulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang berdasarkan etnis seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Pat Petulai, Kerajaan Balai Buntar, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sekiris, Kerajaan Gedung Agung, dan Kerajaan Marau Riang. Di bawah Kesultanan Banten, mereka menjadi vazal. Sebagian wilayah Bengkulu, juga pernah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Inderapura semenjak abad ke-17.

British East India Company (EIC) sejak 1685 mendirikan pusat perdagangan lada. *Bencoolen/Coolen* yang berasal dari bahasa Inggris *Cut Land* yang berarti tanah patah wilayah ini adalah wilayah patahan gempa bumi yang paling aktif di dunia dan kemudian gudang penyimpanan di tempat yang sekarang menjadi Kota Bengkulu. Saat itu, ekspedisi EIC dipimpin oleh *Ralph Ord* dan *William Cowley* untuk mencari pengganti pusat perdagangan lada setelah Pelabuhan Banten jatuh ke tangan VOC, dan EIC dilarang berdagang di sana. Traktat dengan kerajaan seleba pada tanggal 12 Juli 1685 mengizinkan Inggris untuk mendirikan benteng dan berbagai gedung perdagangan. Benteng York didirikan tahun 1685 di sekitar muara Sungai Serut.

Sejak tahun 1713, dibangun

benteng Marlborough (selesai 1719) yang hingga sekarang masih tegak berdiri. Namun, perusahaan ini lama kelamaan menyadari tempat itu tidak menguntungkan karena tidak bisa menghasilkan lada dalam jumlah mencukupi.

Sejak dilaksanakannya Perjanjian London pada tahun 1824, Bengkulu diserahkan ke Belanda, dengan imbalan Malaka sekaligus penegasan atas kepemilikan Tumasik/Singapura dan Pulau Belitung. Sejak perjanjian itu Bengkulu menjadi bagian dari Hindia Belanda. Penemuan deposit emas di daerah Rejang Lebong pada paruh kedua abad ke-19 menjadikan tempat itu sebagai pusat penambangan emas hingga abad ke-20. Saat ini, kegiatan penambangan komersial telah dihentikan semenjak habisnya deposit. Pada tahun 1930-an, Bengkulu menjadi tempat pembuangan sejumlah aktivis pendukung kemerdekaan, termasuk Sukarno. Pada masa inilah Sukarno berkenalan dengan Fatmawati yang kelak menjadi istrinya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi keresidenan dalam provinsi Sumatra selatan. Wilayah Bengkulu dahulu juga meliputi Kawedanan Krui yang meliputi Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat saat ini. Akan tetapi, berdasarkan hasil plebisit pada tahun 1951, Krui menjadi bagian

dari Lampung. Pada tanggal 18 November 1968 Bengkulu menjadi provinsi Indonesia ke-26 (termuda sebelum Timor Timur).

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 tersebut meliputi wilayah bekas Keresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km², terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara (ibukota Argamakmur) yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan (ibukota Manna) yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong (ibukota Curup) yang terdiri dari 10 kecamatan. Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :¹

1. Kota Bengkulu
2. Kabupaten Bengkulu Tengah
3. Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Kabupaten Bengkulu Utara
5. Kabupaten Kaur
6. Kabupaten Kepahiang
7. Kabupaten Lebong
8. Kabupaten Rejang Lebong
9. Kabupaten Muko Muko

¹ Siti Nurhasanah, *Struktur Sosial dan Identitas Etnik di Bengkulu* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), h.54.

10. Kabupaten Seluma

B. Dinas perdagangan dan perindustrian kota bengkulu

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di sektor perdagangan dan industri di wilayah Kota Bengkulu. Lembaga ini berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Sebagai instansi teknis di bawah Pemerintah Kota Bengkulu, dinas ini menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa, perlindungan konsumen, pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), serta pengawasan barang beredar dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 35 Ayat 1 huruf d tentang perdagangan yang berbunyi pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan barang dan /atau jasa untuk kepentingan nasional dengan

² Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bengkulu, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023*, <https://disperindag.bengkulukota.go.id/>.

alasan: melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.³

Unit-unit kerja dalam dinas ini mencakup bidang perdagangan dalam negeri, bidang perindustrian, bidang pengembangan usaha, serta bidang pengawasan dan perlindungan konsumen.

Disperindag memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa, termasuk produk tembakau (rokok). Hal ini meliputi:

1. Memastikan produk legal dan sesuai dengan ketentuan label/kemasan (misalnya label “Dilarang dijual kepada anak di bawah umur dan ibu hamil” pada kemasan rokok).
2. Mengawasi distributor dan pengecer agar tidak menjual barang-barang tertentu kepada kelompok rentan (anak dan ibu hamil).
3. Melakukan inspeksi pasar dan toko-toko eceran untuk melihat kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Bengkulu memiliki peran

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014

penting dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang yang mengandung zat adiktif, termasuk produk tembakau. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah memastikan bahwa penjualan rokok tidak dilakukan kepada anak di bawah usia tertentu dan ibu hamil, sebagaimana diatur dalam regulasi nasional dan diturunkan ke dalam pengawasan di daerah.

C. Kondisi perokok remaja dibawah usia 21 tahun dan ibu hamil kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan pusat pemerintahan dan pertumbuhan utama di Provinsi Bengkulu yang mengalami perkembangan dari berbagai aspek, termasuk dalam bidang kesehatan masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul permasalahan kesehatan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu tingginya angka perokok di kalangan remaja dan ibu hamil. Hal ini menjadi tantangan serius karena berdampak langsung terhadap kualitas generasi muda dan kesehatan ibu serta anak.

1. Remaja Perokok

Di kalangan remaja, perilaku merokok cenderung meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Provinsi Bengkulu termasuk lima besar provinsi dengan

prevalensi perokok tertinggi di Indonesia, dengan persentase 35,53% pada penduduk usia ≥ 15 tahun. Studi lokal menunjukkan bahwa usia mulai merokok paling banyak terjadi pada kelompok umur 15–19 tahun, dan dipengaruhi oleh faktor seperti:

a) Dukungan dari teman sebaya dan lingkungan sosial⁴

b) Minimnya pengawasan orang tua

c) Ketersediaan rokok yang mudah diakses

d) Paparan terhadap iklan dan promosi rokok

Perilaku merokok di usia remaja berpotensi menimbulkan gangguan pertumbuhan, menurunkan produktivitas belajar, dan meningkatkan risiko kecanduan di masa dewasa.⁵

2. Ibu hamil perokok

Pada kelompok ibu hamil, permasalahan utama bukan hanya perilaku merokok aktif, tetapi juga paparan asap rokok dari lingkungan (perokok pasif). Hasil penelitian di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa ibu hamil yang terpapar asap rokok selama lebih dari 7 jam per hari memiliki risiko lebih tinggi

⁴ Ramadhani, Gita. "Perilaku Merokok Remaja Ditinjau dari Dukungan Sosial Teman Sebaya." *Jurnal Psikologi*, Vol. 5, No. 2, 2022.

⁵ Nurfiqoh Prabawati. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Remaja di Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu". Universitas Dehasen Bengkulu; 2021. <https://repository.unived.ac.id/52>

untuk melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Paparan asap rokok pada masa kehamilan dapat mengganggu tumbuh kembang janin dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan.

Beberapa penyebab tingginya paparan rokok pada ibu hamil antara lain:

- a) Tingginya angka perokok dalam keluarga, terutama suami
- b) Minimnya pengetahuan tentang bahaya rokok bagi janin
- c) Kurangnya edukasi dalam kunjungan antenatal (ANC)
- d) Budaya permisif terhadap merokok di ruang domestik

Masih tingginya angka merokok di kalangan remaja dan ibu hamil di Kota Bengkulu mencerminkan lemahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok, serta belum optimalnya peran keluarga, sekolah, dan layanan kesehatan dalam memberikan edukasi dan menciptakan lingkungan sehat. Pemerintah daerah perlu memperkuat program pengendalian tembakau, penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta peningkatan promosi kesehatan secara menyeluruh agar dapat menurunkan angka perokok di dua

kelompok rentan ini.

